

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibuat sebagai upaya untuk menjelaskan faktor-faktor dalam penelitian ini, serta untuk pemeriksaan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian relevan tentang Implementasi Program Pembinaan Anak Jalanan yang pernah peneliti baca yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu penelitian dari Fini Saulinaria Harefa (2017), Syamsul Arifin (2017), Jonathan Tribuwono (2017), Bayu Saputra (2021), dan Engkus (2019).

Berikut paparan mengenai kaitan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 2. 1 Relevansi Penelitian Terdahulu dan Penelitian Penulis

No.	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
1.	<p>Penelitian dari Fini Saulinaria Harefa (Skripsi, Universitas Medan Area, 2017) dengan judul <i>Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Medan (Studi Pada Kantor Dinas Sosial Kota Medan)</i>.</p> <p>Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Teknik pengumpulan</p>	<p>Peneliti terdahulu mendeskripsikan implementasi dari Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan serta menjelaskan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program.</p>	<p>Relevansi dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah untuk memperoleh gambaran terkait penelitian dengan aspek implementasi dari program pembinaan terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, dan juga mengetahui bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan.</p>

No.	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
	<p>data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p> <p>Aspek-aspek yang digunakan dalam mengkaji implementasi kebijakan program berupa aspek pelaksanaan, faktor pendukung dan faktor penghambat program.</p>		
2.	<p>Penelitian dari Syamsul Arifin (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017) dengan judul <i>Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung</i>.</p> <p>Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p> <p>Aspek-aspek yang digunakan dalam mengkaji pembinaan anak jalanan berupa aspek pelaksanaan dan analisa program.</p>	<p>Peneliti terdahulu mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan pembinaan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung maupun masyarakat masih menuai berbagai permasalahan, seperti: keterbatasan SDM, dana, sarana dan prasarana, serta kualitas pelayan yang masih bervariasi, akibatnya usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum menunjukkan hasil yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.</p>	<p>Relevansi dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah untuk memperoleh gambaran terkait bentuk-bentuk pembinaan terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial.</p>
3.	<p>Penelitian dari Jonathan Tribuwono (Skripsi, Universitas</p>	<p>Peneliti terdahulu mendeskripsikan implementasi dari</p>	<p>Relevansi dari penelitian terdahulu dengan</p>

No.	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
	<p>Hasanuddin, 2017) dengan judul <i>Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial)</i>.</p> <p>Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p> <p>Aspek-aspek yang digunakan dalam mengkaji implementasi kebijakan program berupa deskripsi implementasi program.</p>	<p>Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar terutama pada aspek kinerja, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan/disposisi para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.</p>	<p>penelitian penulis adalah untuk memperoleh gambaran terkait penelitian dengan aspek implementasi dari program pembinaan terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, dan juga mengetahui bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan.</p>
4.	<p>Penelitian dari Bayu Saputra (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021) dengan judul <i>Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru</i>.</p> <p>Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif metode</p>	<p>Peneliti terdahulu mendapatkan hasil evaluasi dari program pembinaan terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum berjalan secara efektif karena beberapa hambatan yang terjadi.</p>	<p>Relevansi dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah untuk memperoleh gambaran terkait bentuk-bentuk pembinaan terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, serta mengetahui</p>

No.	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
	<p>deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p> <p>Aspek yang digunakan dalam mengkaji evaluasi program berupa hambatan dalam evaluasi program.</p>		<p>evaluasi program pembinaan terhadap anak jalanan yang diteliti oleh peneliti terdahulu.</p>
5.	<p>Penelitian dari Engkus (Jurnal, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 2019) dengan judul <i>Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Kota Bandung</i>.</p> <p>Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p>	<p>Peneliti terdahulu mendapatkan hasil bahwa bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dikelompokkan ke dalam empat (4) bentuk. Berikut adalah ke-empat bentuk pembinaan yang dimaksud: (1) Pembinaan, yang mencakup tiga langkah yaitu, pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial; (2) Pemberdayaan; (3) Bimbingan Lanjutan; (4) Partisipasi Masyarakat.</p>	<p>Relevansi dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah untuk memperoleh gambaran terkait penelitian dengan aspek implementasi dari program pembinaan terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, dan juga mengetahui bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan.</p>

Tabel 2.1 sebelumnya menunjukkan hasil yang diberikan penelitian terdahulu terhadap penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu di atas

memiliki persamaan penelitian pada objek yang digunakan yaitu Program Pembinaan Anak Jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Penelitian terdahulu di atas memberikan gambaran tentang sub masalah dan juga gambaran tentang metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis hasil penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian terdahulu yang dijabarkan sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini menggunakan perspektif pekerjaan sosial dan juga terdapat usulan program yang diusulkan untuk menjawab permasalahan dari analisis masalah penelitian.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan tentang Implementasi

A. Pengertian Implementasi

Terdapat pendapat yang berbeda dari para ahli dalam menyatakan pengertian mengenai implementasi. Secara etimologis pengertian implementasi adalah “Kata *to implement* berasal dari bahasa Latin “*implementum*” dari asal kata “*impere*” dan “*plere*”. Kata “*implere*” dimaksudkan “*to full up*”; “*to fill in*”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*”, yaitu mengisi”. (Kamus Webster dalam Tachjan, 2006, hal. 23)

Implementasi kebijakan meliputi sebuah aksi yang dilakukan oleh individu publik dan swasta atau sekelompok orang yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah diputuskan sebelumnya berdasarkan keputusan kebijakan. (Van Meter dan Van Horn, 1975).

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan saat undang-undang telah diputuskan, setelahnya memunculkan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu hal keluaran yang nyata (*tangible output*). (Ripley dan Franklin dalam Kasmad, 2018).

Dari ke-tiga pengertian implementasi menurut para ahli sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah sebuah pelaksanaan atau tindakan yang direncanakan dengan baik oleh individu maupun kelompok

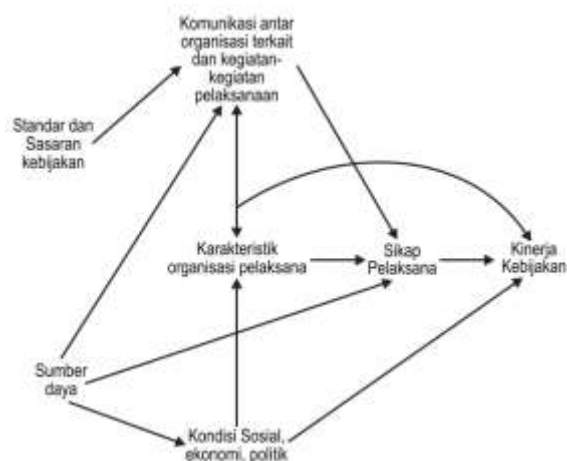
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dapat memunculkan suatu dampak atau akibat terhadap suatu hal.

B. Proses Implementasi

Model implementasi yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Model ini menyatakan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan, menguraikan tujuan keseluruhan dari kebijakan keputusan, dinyatakan dengan kejelasan yang cukup sehingga pelaksana dapat mengetahui apa tujuan yang diharapkan dari sebuah implementasi yang dijalankan.
2. Sumber daya, menyertakan dana atau insentif lain seperti sumber daya manusia dalam program yang dapat mendorong atau memfasilitasi implementasi yang efektif.
3. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, mensyaratkan bahwa standar dan tujuan program dipahami oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas pencapaiannya, memperhatikan kejelasan standar dan tujuan, keakuratan komunikasi mereka dengan pelaksana, dan konsistensi (atau keseragaman) dengan mana mereka disampaikan melalui berbagai sumber informasi.
4. Karakteristik organisasi pelaksana, hubungan lembaga pelaksana dengan peserta lain dalam sistem penyampaian kebijakan, bagaimana daya dukung yang diberikan setelah didukung oleh berbagai sumber daya.
5. Sikap para pelaksana, pemahaman pelaksana tentang maksud umum, seperti serta standar khusus dan tujuan kebijakan, adalah hal yang terpenting, sehingga para pelaksana perlu memahami dan bagaimana respon dari arah kebijakan tersebut.

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, apakah sumber daya ekonomi tersedia dalam pelaksanaan yang cukup untuk mendukung keberhasilan penerapan/implementasi, sejauh mana dan bagaimana ekonomi dan sosial akan berlaku, apakah pemerintah mendukung atau menentang penerapan kebijakan, sejauh mana kelompok kepentingan swasta mendukung terhadap kebijakan. (Van Meter dan Van Horn, 1975)



Gambar 2. 1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

Proses implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

Ada beberapa faktor yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Policy standard and objective, which 'elaborate on the overall goals of the policy decision. to provide concrete and more specific standard for assessing performance,* (standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program

dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan);

2. *The resources and incentive made available*, (sumber daya, menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik dan dapat menjelsakan nilai yang efisien);
3. *The quality of inter-organizational relationships (we find in their discussion of this, as in so much of the American literature on implemantation, an extensive discussion of aspects of federalism)*, (komunikasi antarbadan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya sering dilaksanakan rapat-rapat rutin secara berkala dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan, agar dapat mendukung komunikasi organisasi antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan dengan kelompok sasaran yang mampu memahami serta bertanggung jawab atas program yang dilaksanakan);
4. *The characteristics of the implementation agencies, including issues like organizational control but also, going back surely to inter organizational issues, 'the agency`s formal and informal linkages with the "policy-making" or "policy-enforcing" body'*, (karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung organisasi yang mendapat dukungan dari struktur (sumber daya) organisasi, nilai-nilai (budaya) yang berkembang dalam organisasi, hubungan dan interaksi komunikasi internal organisasi dalam birokrasi);
5. *The economic, social and political environment*, (lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dan ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri); dan

6. *The disposition or response of the implementers, involving three elements: 'their cognition (comprehension, understanding) of the policy, the direction of their response to it (acceptance, neutrality, rejection) and the intensity of that response'*, (sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa besar demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan, beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini). (Van Meter dan Van Horn, 1975).

C. Implementasi Program

Kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi kedalam program-program yang bersifat operasional. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. (Van Meter dan Van Horn, 1975).

Implementasi adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan suatu program. (Grindle dalam Tachjan, 2006).

Implementasi program adalah suatu unsur dalam sebuah kebijakan, yang merupakan usaha yang berwenang dalam menggapai tujuan. (Jones dalam Arif Rohman, 2009).

Sebuah program yang berhasil adalah program yang terdapat keselarasan dari tiga elemen implementasi program, yang pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, artinya apa yang diusulkan oleh program dan apa yang diperlukan oleh pemanfaat terdapat kesamaan. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, artinya tugas yang diminta oleh program dan kecakapan organisasi pelaksana terdapat kecocokan. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, artinya permintaan yang ditentukan organisasi untuk dapat mencapai keluaran program dan apa yang bisa dilakukan oleh kelompok

sasaran program terdapat kesesuaian. (David C. Korten dalam Haedar Akib & Antonius, 2000).

Uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa implementasi program yang efektif didasarkan pada aksi atau tindakan yang terencana dan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan aksi tersebut diperlukan sumber daya yang optimal dan memenuhi kemampuan untuk terealisasinya tujuan program sesuai dengan yang diharapkan.

D. Unsur-unsur Implementasi

Implementasi terdiri dari beberapa unsur dan kegiatan yang terarah dan direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. “Implementasi terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur pelaksana (*Implementator*), Program yang dilaksanakan, dan Kelompok sasaran (*target groups*)”. (Abdullah dan Smith dalam Tachjan, 2006, hal. 27) Berikut ini adalah penjelasan dari unsur-unsur pengimplementasian suatu program, diantaranya:

1. Unsur Pelaksana (*Implementator*)

Pihak yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan kebijakan publik adalah elemen-elemen pemerintahan. (Ripley dan Franklin dalam Tachjan, 2006). Dapat diartikan birokrasi pemerintah adalah pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik.

2. Program yang Dilaksanakan

Program-program yang sifatnya operasional adalah program-program yang berisi hal-hal yang dapat dengan mudah dipahami serta dilaksanakan oleh para pelaksana program. Program yang dilaksanakan tersebut berisi bukan hanya kejelasan tujuan/sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah, tetapi secara jelas telah menggambarkan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, selanjutnya kejelasan metode dan prosedur kerja yang wajib ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani. (Grindle dalam Tachjan, 2006).

3. Kelompok Sasaran (*Target Groups*)

Kelompok sasaran adalah sekelompok individu atau organisasi yang akan menerima barang atau jasa yang perilakunya akan dipengaruhi oleh kebijakan. Kelompok tersebut dinantikan dapat menerima dan memadankan dirinya terhadap pola-pola interaksi yang ditetapkan oleh kebijakan. (Tachjan, 2006).

2.2.2 Tinjauan tentang Anak Jalanan

A. Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. (Permensos No. 8 Tahun 2012 tentang PMKS dan PSKS).

Dari uraian yang disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan variabel-variabel yang penting adalah sebagai berikut:

1. Anak;
2. Menghabiskan sebagian besar waktunya;
3. Mencari penghasilan;
4. Jalanan.

B. Ciri-ciri Anak Jalanan

Adapun ciri-ciri anak jalanan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Berada di tempat umum (jalanan, pasar, petokoan, tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari;
2. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, dan sedikit sekali yang tamat sd);
3. Berasal dari keluarga-keluarga yang tidak mampu (kebanyakan kaum urban, dan beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya);
4. Melakukan aktivitas ekonomi (pekerjaan pada sector informal). (Tata Sudrajat, 1996).

C. Klasifikasi Anak Jalanan

Anak jalanan terbagi di dalam tiga kelompok, yaitu:

1. *Children on the street*

Anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orangtua dan sebagian penghasilan mereka di jalanan diberikan kepada orangtua. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk memperkuat penyangga ekonomi keluarga, karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh orangtua.

2. *Children of the street*

Anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orangtuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak karena suatu sebab (biasanya kekerasan) lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial-emosional, fisik maupun seksual.

3. *Children from families of the street*

Anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lainnya dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi bahkan saat masih di dalam kandungan. Di Indonesia, kategori ini dengan mudah ditemui diberbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api, dsb. (Surbakti dalam Bagong Suyanto, 2003, hal. 186-187).

Berdasarkan identifikasi yang disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi anak jalanan ialah anak-anak yang bekerja di jalanan yang masih memiliki keluarga dan masih bertemu dengan orangtua,

lalu anak-anak yang beraktivitas secara penuh di jalanan yang sebagian besar sudah tidak bertemu dengan orangtuanya, yang terakhir anak-anak beserta keluarganya menghabiskan seluruh waktu hidupnya di jalanan dan berpindah-pindah.

D. Faktor Penyebab adanya Anak Jalanan

Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab munculnya fenomena anak jalanan, yaitu:

1. Sejumlah kebijakan makro dalam bidang sosial ekonomi telah menyumbang munculnya fenomena anak jalanan;
2. Modernisasi, industrialisasi, migrasi, dan urbanisasi menyebabkan terjadinya perubahan jumlah anggota keluarga dan gaya hidup yang membuat dukungan sosial dan perlindungan terhadap anak menjadi berkurang;
3. Kekerasan dalam keluarga menjadi latar belakang penting penyebab anak keluar dari rumah dan umumnya terjadi dalam keluarga yang mengalami tekanan ekonomi dan jumlah anggota keluarga yang besar;
4. Terkait permasalahan ekonomi sehingga anak terpaksa ikut membantu orangtua dengan bekerja di jalanan;
5. Orangtua “mengkaryakan” sebagai sumber ekonomi keluarga pengganti peran yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa/orangtua. (Tata Sudrajat, 1996).

Berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyebab munculnya anak di jalanan adalah karena faktor ekonomi, gaya hidup, kekerasan dalam keluarga, membantu orangtua, dan orangtua menjadikan anak sebagai sumber ekonomi keluarga.

E. Masalah Anak Jalanan

Berikut dijabarkan masalah yang dihadapi anak jalanan dalam format tabel:

Tabel 2. 2 Permasalahan yang Dihadapi Anak Jalanan

Aspek	Permasalahan yang Dihadapi
Pendidikan	Sebagian besar putus sekolah karena waktunya habis di jalanan
Intimidasi	Menjadi sasaran tindak kekerasan anak jalanan yang lebih dewasa, kelompok lain, petugas dan razia
Penyalahgunaan narkoba	Ngelem, minuman keras, pil BK dan sejenisnya
Kesehatan	Rentan penyakit kulit, PMS, gonorrhoe, paru-paru
Tempat tinggal	Umumnya di sembarang tempat, digubuk-gubuk atau di pemukiman kumuh
Resiko kerja	Tertabrak, pengaruh sampah
Hubungan dengan keluarga	Umumnya renggang dan bahkan sama sekali tidak berhubungan
Makanan	Seadanya, kadang mengais dari tempat sampah, kadang membeli tetapi tidak sehat/higienis.

Sumber: Buku Masalah Sosial Anak oleh Bagong Suyanto

F. Kebutuhan Anak Jalanan

Anak jalanan seperti anak pada umumnya memerlukan kebutuhan yang dapat menunjang kehidupan, Adapun kebutuhan anak jalanan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Pangan, Sandang, dan Papan;
2. Kebutuhan Identitas Diri;
3. Kebutuhan Kesehatan;
4. Kebutuhan Perlindungan;
5. Kebutuhan Pendidikan;
6. Kebutuhan Berpartisipasi. (Tata Sudrajat, 1996).

G. Pendekatan Penanganan Masalah Anak Jalanan

Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam menangani permasalahan anak jalanan, diantaranya:

1. *Street Based*, adalah pendekatan di jalanan untuk menjangkau serta mendampingi anak di jalanan untuk mengenal, mendampingi anak di jalanan, mempertahankan relasi dan komunikasi, serta melakukan

penanganan di jalanan, seperti konseling, diskusi, permainan, dan pemberian informasi. Orientasi *street based* diarahkan pada upaya menangkal pengaruh-pengaruh negatif di jalanan dengan nilai-nilai dan wawasan positif.

2. *Center Based*, adalah pendekatan yang menempatkan anak jalanan sebagai penerima pelayanan ditempatkan pada suatu pusat kegiatan dan tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu. Selama berada di pusat kegiatan, ia akan memperoleh pelayanan sampai mencapai tujuan yang dikehendaki.
3. *Family and Community Based*, adalah pendekatan dengan keterlibatan keluarga dan masyarakat, tujuannya mencegah anak-anak turun ke jalanan serta memenuhi penyediaan sarana kebutuhan anak. *Family And Community Based* mengarah pada usaha menumbuhkan kesadaran, tanggungjawab, partisipasi anggota keluarga, dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan. (Tata Sudrajat dalam Suyanto, 2013).

Berdasarkan ke-tiga pendekatan yang dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendekatan penanganan anak jalanan adalah dengan melakukan penanganan di jalanan, menempatkan anak pada suatu pusat kegiatan, dan partisipasi dari anggota keluarga untuk pencegahan.

H. Hak Anak

Anak memiliki hak dan kedudukan yang harus dilindungi oleh Pemerintah, begitupun dengan hak anak jalanan. Pemerintah memberikan perlindungan hukum yang dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak jalanan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Hak tersebut meliputi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi.

2.2.3 Tinjauan tentang Praktik Pekerjaan Sosial

A. Pengertian Pekerjaan Sosial

Praktik pekerjaan sosial adalah “penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat”. (UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial).

Pekerjaan Sosial adalah:

Pekerjaan sosial adalah profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mendorong perubahan sosial dan pembangunan, kohesi sosial, pemberdayaan dan pembebasan orang. Prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab bersama dan penghormatan terhadap keragaman sangat penting dalam pekerjaan sosial. Didukung oleh teori pekerjaan sosial, ilmu sosial, humaniora dan pengetahuan murni, pekerjaan sosial melibatkan orang dan struktur untuk mengatasi tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan”. (*International Association of Schools of Social Work (IASSW)*, 2014).

Pekerjaan sosial adalah suatu pengetahuan yang bermula dari rangkaian pemikiran dari para filantropis yang berbetulan juga merupakan relawan. Pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan yang memfokuskan pada keberfungsian sosial manusia dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya. Penegasan pada aspek keberfungsian sosial manusia tersebutlah yang menjadi pembanding antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi pertolongan lainnya. (Taufiquokhman, Trustisari dan Harisetyo, 2022).

Berdasarkan ke-tiga pengertian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial adalah sebuah praktik yang mendorong perubahan sosial dengan kegiatan yang profesional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk mengembalikan keberfungsiansosial mereka dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan.

B. Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan tujuan:

1. Mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
2. Memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; dan
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial).

C. Fungsi Pekerjaan Sosial

Fungsi dasar pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

1. Mencegah disfungsi sosial;
2. Melaksanakan Pelindungan Sosial;
3. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial;
4. Melaksanakan Pemberdayaan Sosial;
5. Melaksanakan Pengembangan Sosial. (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial).

D. Prinsip Pekerjaan Sosial

Dalam teori Midgley, prinsip-prinsip pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Penerimaan (*The Principle of Acceptance*)

Prinsip ini melihat bahwa praktisi kesejahteraan sosial harus berusaha menerima (*client*) mereka apa adanya, tanpa menghakimi klien tersebut. Kemampuan praktisi kesejahteraan sosial untuk menerima klien (pihak yang membutuhkan bantuan) dengan sewajarnya akan dapat banyak membantu perkembangan relasi antara mereka. Maka sebagai praktisi kesejahteraan sosial harus berusaha untuk tidak menghakimi klien tersebut berdasarkan penampilan fisiknya. Seorang praktisi harus berusaha meredam perasaan suka atau tidak suka yang terlihat dari penampilan fisik seseorang. Karena dengan adanya sikap (*acceptance*) maka klien akan dapat merasa lebih percaya diri dan tidak kaku dalam berbicara dengan praktisi kesejahteraan sosial, sehingga ia dapat mengungkapkan perasaan yang menganjat di hatinya. Dengan cara seperti ini maka relasi antara praktisi dengan klien dapat dikembangkan.

2. Prinsip Komunikasi (*The Principle of Communication*)

Prinsip komunikasi ini berkaitan erat dengan kemampuan praktisi kesejahteraan sosial untuk menangkap informasi ataupun pesan yang dikemukakan oleh klien. Pesan yang disampaikan klien dapat berbentuk pesan verbal, yang diucapkan klien melalui ucapannya. Atau pesan tersebut dapat berbentuk non verbal, misalnya dari cara duduk klien cara menggunakan tangannya, cara klien meletakkan tangannya dan sebagainya. Dari pesan non verbal tersebut kita bisa menangkap apakah klien sedang merasa gelisah, cemas, takut, gembira, dan berbagai ungkapan lainnya. Bila suatu saat klien tidak dapat mengungkapkan perasaan apa yang dirasakan, praktisi kesejahteraan sosial diharapkan dapat membantu klien tersebut untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Dengan berkembangnya komunikasi antara praktisi dan klien, maka praktisi dapat menelaah permasalahan. Praktisi harus bisa menangkap informasi yang dilontarkan klien baik verbal maupun non verbal dari si klien.

3. Prinsip Kerahasiaan (*The Principle Of Confidentiality*)

Dalam prinsip ini praktisi kesejahteraan sosial harus menjaga kerahasiaan dari kasus yang sedang ditanganinya. Sehingga kasus itu tidak dibicarakan dengan sembarang orang yang tidak terkait dengan penanganan kasus tersebut. Dengan dijamin kerahasiaan ini, maka klien akan dapat lebih bebas mengungkapkan permasalahan yang ia hadapi ataupun perasaan yang ia rasakan. Ia akan merasa lebih aman mengungkapkan perasaannya karena ia yakin apa yang ia utarakan dalam relasi dengan praktisi kesejahteraan sosial akan terjaga kerahasiaannya.

4. Prinsip Partisipasi (*The Principle Of Participation*)

Praktisi diharapkan akan mengajak kliennya untuk ikut serta berperan aktif dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Karena tanpa peran aktif dari klien, maka tujuan dari terapi tersebut sulit untuk tercapai. Dalam prinsip ini, tergambar bahwa perbaikan kondisi seseorang bukanlah hasil kerja dari praktisi kesejahteraan sosial itu sendiri. Tetapi rasa tanggung jawab dan keinginan yang sungguh dari klien untuk memperbaiki kondisinya justru menjadi kunci keberhasilan dari proses pemberian bantuan ini.

5. Prinsip Individualisasi (*The Principle Of Individualization*)

Menganggap setiap individu itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga seorang praktisi kesejahteraan sosial haruslah berusaha memahami keunikan (*uniqueness*) dari setiap klien. Karena itu, dalam proses pemberian bantuan harus berusaha mengembangkan intervensi yang sesuai dengan kondisi kliennya agar mendapatkan hasil yang optimal. Dengan adanya prinsip individualisasi ini maka praktisi kesejahteraan sosial diharapkan tidak menyamaratakan setiap klien. Sehingga pendekatan dalam melakukan terapi lebih diutamakan dengan penanganan kasus perkasus.

6. Prinsip Sadar Diri (*The Principle Of Self a Warness*)

Prinsip kesadaran diri (*self a warness*) ini menuntut praktisi kesejahteraan sosial untuk bersikap profesional dalam menjalin relasi dengan kliennya. Dalam arti bahwa praktisi kesejahteraan sosial harus mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak terhanyut oleh perasaan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh kliennya. Praktisi kesejahteraan sosial di sini haruslah tetap rasional, tetapi harus mampu menyelami perasaan kliennya secara objektif. Apabila seorang pekerja sosial tidak dapat mengendalikan emosinya maka sebaiknya klien tersebut dialihkan ke praktisi pekerja sosial yang lain.

7. Prinsip Tidak Menghakimi (*The Principle Of Non Judgment*)

Pekerjaan sosial yang menerapkan sikap tidak menghakimi tidak menimbulkan rasa bersalah, atau derajat tanggung jawab klien atas sebab-sebab masalah atau kebutuhan-kebutuhan, tetapi meliputi pemberian penilaian-penilaian evaluatif tentang sikap-sikap, standar-standar, atau tindakan-tindakan klien. Sikap tidak menghakimi diterapkan ke dalam semua proses pekerjaan sosial. Akan tetapi, keadaan-keadaan tertentu seperti saat-saat ketika klien merasa terdemoralisasi, terstigmatisasikan, atau disalahkan, menuntut sikap tidak menghakimi yang sangat sensitif.

E. Metode Pekerjaan Sosial

Praktik pekerjaan sosial dikenal sebagai metode. Adapun jenis-jenis Metode Pekerjaan Sosial sebagai berikut:

1. *Social Case Work* (Terapi Individu dan Keluarga)

Metode perubahan sosial terencana pada individu dan keluarga pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan yang mempunyai masalah.

2. *Social Group Work* (Bimbingan Sosial Kelompok)

Metode perubahan sosial terencana pada kelompok disebut dengan metode *group work*. Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok.

3. *Community Organization and Community Development* (Metode Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat)

Metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat merupakan model intervensi yang diarahkan pada upaya merubah masyarakat di tingkatan yang lebih luas. (Taufiquokhman, Trustisari & Harisetyo, 2022, hal. 18-20).

2.2.4 Tinjauan tentang Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak

A. Standar Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak

Standar keterampilan yang harus dikuasai adalah dengan mengetahui:

1. Teori-teori pekerjaan sosial, nilai serta metode yang dilakukan pekerja sosial dalam praktiknya dengan anak.
2. Undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan anak dan keluarga yang berlaku.
3. Menginterpretasikan tahapan-tahapan perkembangan anak.
4. Menguasai keterampilan komunikasi dan improvisasinya.
5. Asesmen, sesuai dengan (kerangka penilaian) *framework assessment*.
6. Memahami *safeguarding* (pengamanan), *child protection* (perlindungan anak) dan bagaimana membedakannya.
7. Melaksanakan keterampilan analisis kritis secara efektif.
8. Melaksanakan sebuah perencanaan yang efektif.
9. Melakukan Pencatatan (*recording*).
10. Bekerja di dan sekitar organisasi.
11. Memiliki penjagaan diri pekerja sosial sebagai perannya. (Susilowati, E., 2020).

B. Pedoman Praktik Pekerjaan Sosial di Bidang Kesejahteraan Anak

Pedoman praktik pekerjaan sosial di bidang kesejahteraan anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Memanifestasikan Komitmen Kepada Nilai dan Etika Pekerjaan Sosial.** Pelayanan pekerja sosial yang diberikan untuk kesejahteraan anak harus dijamin dengan nilai dan etika pekerjaan sosial serta harus melaksanakan tanggung jawab etis sebagai pekerja sosial.
2. **Kualifikasi, Pengetahuan, dan Persyaratan Praktik.** Memiliki latar belakang pendidikan profesi pekerjaan sosial, baik sarjana maupun magister, dan didukung dengan penguasaan pengetahuan praktik pekerjaan sosial di bidang anak.
3. **Pembangunan Profesional Pekerja Sosial yang Bekerja pada Bidang Kesejahteraan Anak.** Pekerja sosial anak harus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan untuk dapat memberikan pelayanan kepada anak, pemuda dan keluarganya secara tepat.
4. **Advokasi.** Pekerja sosial anak harus melakukan usaha advokasi untuk perubahan yang terjadi di dalam sistem sumber agar sistem sumber tersebut dapat memberikan pelayanan secara lebih baik kepada anak dan keluarganya.
5. **Kolaborasi.** Pekerja sosial anak wajib melakukan kolaborasi interdisipliner dan interorganisasional untuk mendorong, mengembangkan, dan memberikan pelayanan yang efektif kepada anak dan keluarganya yang tujuannya untuk menjamin anak dan keluarganya mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.
6. **Menjaga Catatan dan Kerahasiaan Informasi Klien.** Pekerja sosial harus menjaga informasi tentang klien dan perlu menjaga catatan pelayanan menurut peraturan yang berlaku.
7. **Kompetensi Budaya.** Pekerja sosial patut dengan intens berupaya untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman khusus yang

berhubungan dengan sumber-sumber yang sesuai dengan budaya dan keluarganya.

8. Asesmen. Pekerja sosial anak harus melakukan secara komperhensif asesmen awal tentang anak dan sistem keluarganya untuk mendapatkan informasi yang penting serta untuk merancang rencana intervensi atau pelayanan bagi anak dan keluarganya.
9. Intervensi. Pekerja sosial yang sudah melaksanakan asesmen yang terbukti kebenarannya harus merancang intervensi yang tujuannya untuk lebih mengembangkan kondisi klien yang positif, dan menyertakan anak dan keluarga mereka, kolega lain seperti otoritas sekolah, serta pemberi pelayanan lain yang sesuai.
10. *Family Engagement*. Pekerja sosial harus menyertakan keluarganya dengan perannya sebagai mitra di dalam proses asesmen, intervensi dan upaya-upaya reunifikasi.
11. Pelibatan Anak. Pekerja sosial harus menguasai serta mengetahui kemampuan dan kekuatan anak, mengimplementasikan strategi intervensi yang tepat dengan perkembangan anak, dan memberi penghargaan untuk anak.
12. *Permanency Planning*. Pekerja sosial harus membuat pengaturan untuk menempatkan anak di keluarga lain yang dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi anak, namun demikian, pekerja sosial tetap bersama anak untuk menjaga hubungan anak dengan keluarga, teman atau orang lain yang memiliki hubungan yang nyaman.
13. Supervisi. Pekerja sosial anak memiliki kewajiban untuk mendukung perbaikan dan menjaga tempat kerja yang positif untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, dan memastikan sifat layanan yang diberikan.
14. *Administration*. Pekerja Sosial yang bergerak sebagai administrator adalah memupuk budaya hirarkis yang dapat menjunjung tinggi pelaksanaan pelayanan yang efektif bagi anak-anak dan keluarganya.

(*National Association of Social Work-NASW* dalam Susilowati, E., 2020).

C. Nilai dan Etika Bekerja dengan Anak

Pekerja sosial saat bekerja dengan anak-anak memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak yang menjadi klien mereka selain orang tua dan keluarga mereka. (Laughin & Laughin dalam Susilowati, E., 2020). Berikut yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan anak:

1. Keragaman (*Diversity*)

Pekerjaan sosial harus dapat mengenali apa yang baik berdasarkan apa yang tidak biasa dan apa yang buruk.

2. Nilai dan Etika Profesional

Kode etik praktik bekerja dengan anak adalah sebagai berikut:

- a. Mempromosi dan melindungi hak anak
- b. Komunikasi yang tepat dan efektif
- c. Bekerja dengan penuh perhatian terkait kendala kapasitas
- d. Dukung perwakilan utama
- e. Menyimpan kerahasiaan
- f. Mengawasi resiko
- g. Melaporkan masalah keamanan
- h. Terbuka saat ada masalah
- i. Jujur dan dapat diandalkan
- j. Menyimpan catatan.

3. Nilai Lembaga

Sebagai pekerja sosial yang peduli untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan lebih mengembangkan kemakmuran mereka, tidak hanya membuat keputusan yang cerdas, mereka juga harus mengikuti pendekatan dari lembaga tempat yang dipimpinnya bekerja.

4. Nilai yang Berlaku di Masyarakat

Pekerja sosial yang bekerja dengan anak-anak juga harus mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda atau perbedaan sosial sebagai kualitas dan moral budaya, seperti kebiasaan, budaya yang terkait dengan pengasuhan anak. (Susilowati, E., 2020).

D. Proses Praktik dan Bekerja dengan Anak

Berikut adalah tahapan praktik pekerja sosial dengan anak:

1. Proses Awal Bekerja dengan Anak (*Intake Process*)

Intake Process adalah tahapan awal yang dilakukan pekerja sosial untuk mengawali pemberian pertolongan pada anak. Tujuannya untuk membangun relasi profesional antara pekerja sosial dengan anak dan keluarganya. Pada tahap ini pekerja sosial perlu memperhatikan usia dan kondisi anak, agar komunikasi yang dilakukan dapat efektif. Keterampilan yang diperlukan pada tahap ini adalah mengatur irama, bahasa yang sederhana, memberikan tanggapan empati dan empatik, memberikan pertanyaan terbuka, berfokus pada pikiran dan perasaan klien anak, mendengarkan secara aktif dan memastikan bahwa klien didengar, dan mencatat untuk tujuan asesmen.

Kegiatan pada tahap awal adalah sebagai berikut:

- a. Kontak, adalah proses awal berkomunikasi antara pekerja sosial dengan anak dan keluarganya dengan tujuan melakukan proses pertolongan profesional. Kontak dapat dilaksanakan secara tatap muka ataupun dengan media komunikasi (seperti telepon, *whatsapp*). Namun kontak dapat lebih efektif tatap muka.
- b. Kontrak dengan Anak, setelah relasi dengan anak terbangun, pekerja sosial membuat kontrak atau kesepakatan yang disetujui oleh anak dan keluarganya untuk terlibat dalam proses pelayanan. Dalam proses kontrak dengan anak harus dibuat lembar kesepakatan (*informed consent*) yang ditandatangani oleh anak, orangtua dan pekerja sosial. Hal-hal yang disepakati diantaranya adalah:

kesediaan anak untuk diwawancara, di foto, waktu untuk wawancara. Jika usia anak belum memadai, dapat ditandatangani oleh orangtua. (Susilowati, E., 2020)

2. Asesmen

Asesmen adalah komponen utama yang dilakukan untuk menangani permasalahan anak dan keluarga. Diartikan sebagai proses pengumpulan informasi serta data anak beserta lingkungan sosialnya untuk menemukannya masalah, kebutuhan dan potensi anak yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pada pelaksanaan intervensi penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Proses asesmen anak harus melibatkan anak dan keluarga secara aktif sehingga membantu pekerja sosial lebih memahami mereka yang menjadi kliennya.

Pada kerangka kerja untuk melakukan asesmen dengan anak (*framework for the assessment*) terdapat tiga dimensi yang harus diperhatikan dalam melakukan asesmen dengan anak, yaitu:

- a. *Child's development needs* (Kebutuhan perkembangan anak)
- b. *Parenting Capacity* (Kapasitas pengasuhan)
- c. *Family and environmental factors* (Faktor-faktor keluarga dan lingkungan). (Susilowati, E., 2020).

Alat-alat asesmen yang digunakan pekerja sosial adalah asesmen keluarga dan lingkungannya, asesmen biopsikososial, sejarah kehidupan anak, asesmen potensi anak (*seeleby strength*), asesmen risiko, dan asesmen pengalaman kekerasan pada anak. Selain itu, *Social Life Road Map* (mapping kehidupan anak), *Body Mapping* (pemetaan tubuh) dan *Mobility Map* (peta mobilitas) dapat juga digunakan. (Susilowati, E., 2020).

3. Rencana Intervensi

Rencana intervensi disusun berdasarkan hasil asesmen untuk menentukan fokus permasalahan, kebutuhan untuk adanya perubahan

atau menyelesaikan permasalahan anak. Pekerja sosial dapat menyampaikan rencana intervensi dalam temu bahas kasus (*case conference*) yang melibatkan *stakeholder* yang berkaitan dengan kasus anak. *Stakeholder* yang terlibat dalam pembahasan kasus diantaranya pengasuh, guru, psikolog, tenaga medis, aparat penegak hukum atau mereka yang terlibat untuk penanganan anak.

Siklus penyusunan rencana intervensi ini dimulai dari adanya kebutuhan perubahan, kemudian pengembangan atau merumuskan tujuan perubahan, pemilihan agen perubahan, melakukan diagnose tentang kebutuhan untuk dilakukannya perubahan terkait dengan pemilihan metode intervensi, pengembangan perencanaan, rencana implementasi sampai langkah-langkah implementasi dan dilanjutkan dengan evaluasi dan tindak lanjut. (Susilowati, E., 2020).

4. Intervensi Penanganan Anak

Intervensi penanganan anak adalah implementasi dari rencana intervensi yang telah pekerja sosial dan para *stakeholder* rancang di dalam proses perencanaan berdasarkan hasil asesmen. Penanganan intervensi dapat dilakukan pada anak, orangtua, keluarga, lembaga pelayanan sosial di masyarakat maupun masyarakat. Intervensi juga dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. (Susilowati, E., 2020).

Terdapat beberapa model intervensi penanganan anak, yaitu:

a. Berpusat pada anak dan terapi keluarga

Pelaksanaan untuk intervensi ini dapat dilakukan pada pertemuan anak-anak terlebih dahulu, kemudian pertemuan keluarga dan selanjutnya pertemuan anak-anak dan orangtua. Untuk pertemuan anak, dapat memanfaatkan perawatan (terapi) bermain. Terapi bermain dilengkapi dengan alat bermain, misalnya menggambar dengan tanah liat). (Webb dalam Susilowati E., 2020).

b. Metode berbasis kelompok anak-anak (*Group Work*)

Metode kelompok dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan anak seperti kecemasan, depresi, trauma atau gangguan makan. (Petermann, F. dan Wolgensinger, L. dalam Susilowati, E., 2020).

Intervensi dengan metoda kelompok perlu memperhatikan kelompok usia dan jumlah anggota kelompok serta tingkat homogenitas. (Webb dalam Susilowati, E., 2020).

c. Intervensi komunitas yang melibatkan sekolah, rumah dan komunitas/masyarakat.

Lingkungan dan komunitas adalah pengaturan untuk anak berkembang, dan ada perjanjian dalam beberapa kasus anak bahwa lingkungan dan komunitas berpengaruh pada penanganan anak. Lingkungan kehidupan anak antara lain rumah, sekolah dan komunitas. (Susilowati, E., 2020).

Pekerja sosial dapat melaksanakan intervensi dalam menangani anak dengan bekerjasama melalui sekolah, keluarga dan masyarakat. Dilakukan untuk mengembangkan prestasi anak, menangani perlindungan anak dari kekerasan serta penanganan anak dengan kebutuhan khusus. Pekerja sosial dalam hal ini harus dapat bekerjasama dengan pihak sekolah dan sumber-sumber pelayanan yang ada di masyarakat. (Greenwood, P., Mokowski, P. R., & Kopasz, K. H. dalam Susilowati, E., 2020).

Metoda intervensi komunitas salah satunya dilaksanakan dengan pengembangan masyarakat. Intervensi di komunitas yang berfokus pada entitas geografis yang lebih kecil akan lebih efisien dan efektif. Diantaranya adalah di lingkungan lingkungan terdekat anak dan keluarganya, seperti RT dan RW. (Barnes & Jacqueline dalam Susilowati, E., 2020).

E. Peranan Pekerjaan Sosial di Bidang Anak Jalanan

Berkaitan dengan permasalahan anak jalanan, peranan-peranan yang dapat dilakukan oleh profesi pekerjaan sosial di bidang anak jalanan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai broker, Pekerja Sosial berperan menghubungkan anak jalanan dengan pelayanan sosial yang ada. Hal ini pekerja sosial bertugas menghubungkan anak jalanan (klien) dengan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk mengatasi masalah serta keberfungsian sosial.
2. Sebagai advokat, Pekerja Sosial melakukan aksi sebagai wakil anak jalanan dengan persuasif memperjuangkan hak-hak dan martabat anak jalanan, dimana klien tidak berdaya bertindak sendiri secara efektif dan terdapat birokrasi ataupun kondisi yang mempersulit anak jalanan sebagai klien.
3. Sebagai edukator, Pekerja Sosial memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada orangtua/keluarga agar dapat memahami hak-hak anak.
4. Sebagai motivator, Pekerja Sosial memberikan motivasi dan dukungan kepada anak jalanan dan keluarga agar dapat memecahkan masalah dan hambatan yang dijalani. (Suharto, 2005)

2.2.5 Tinjauan tentang Pelayanan Sosial

A. Pengertian Pelayanan Sosial

Dalam arti luas, pelayanan sosial adalah:

Pelayanan-pelayanan sosial adalah pelayanan yang digunakan untuk semua (*communal service*) yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi jenis-jenis masalah sosial tertentu, khususnya, kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi jenis-jenis masalah sosial tertentu, khususnya, kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang memerlukan penerimaan publik secara umum atau tanggungjawab sosial dan yang tergantung pada pengorganisasian hubungan-hubungan sosial untuk pemecahannya. (Sainsbury dalam Fahrudin, 2012, hal. 48).

Dari pengertian menurut ahli yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelayanan sosial adalah kegiatan terorganisir untuk membantu individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat secara luas yang mengalami ketidakberfungsian sosial sehingga pelayanan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mengurangi masalah sosial.

B. Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial personal mempunyai beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Pelayanan sosial untuk tujuan sosialisasi dan pengembangan. Pelayanan ini diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan atau menyempurnakan kegiatan-kegiatan pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai dan pengembangan hubungan sosial yang dimasa lampau menjadi fungsi keluarga.
2. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi. Pelayanan yang diberikan atau dilaksanakan untuk memberikan pertolongan kepada seseorang baik secara individu maupun kelompok atau keluarga dan masyarakat agar dapat mampu mengatasi masalah-masalahnya.
3. Pelayanan sosial untuk mendapatkan akses, informasi dan nasehat. Pelayanan ini mencakup pemberian informasi, rujukan, partisipasi yang bertujuan untuk membantu orang untuk dapat mencapai atau menggunakan pelayanan-pelayanan yang tersedia. (Adi Fahrudin, 2012, hal. 55).

C. Tinjauan tentang Pelayanan Sosial Anak

Pelayanan sosial anak adalah pelayanan dan program yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang difokuskan untuk anak asuh yang ada di dalam panti asuhan yang tujuannya untuk mensejahterakan anak-anak.

1. Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak merupakan suatu kontinum dari pengasuhan keluarga sampai dengan pengasuhan yang dilakukan oleh pihak lain di luar keluarga atau disebut dengan 'pengasuhan alternatif'. Jika pengasuhan di dalam keluarga tidak dimungkinkan atau tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, maka pengasuhan anak berbasis keluarga pengganti melalui orang tua asuh (*fostering*), perwalian, dan pengangkatan anak harus menjadi prioritas sesuai dengan situasi dan kebutuhan pengasuhan anak. Dan yang merupakan alternatif terakhir, panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak. (Permensos No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak).

2. Pengasuhan Alternatif

Jenis pengasuhan alternatif adalah sebagai berikut:

- a. Pengasuhan oleh orangtua asuh baik melalui adopsi atau wali.

Pengertian orangtua asuh adalah suami isteri atau orangtua tunggal selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan Pengasuhan Anak yang bersifat sementara. Pelaksanaan Pengasuhan Anak bertujuan untuk memenuhi pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil anak dan diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap anak. (PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak). Selanjutnya disebutkan pengasuh anak pada pasal 7 sebagai berikut:

- 1) Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- 2) Keluarga sedarah dalam garis menyimpang; atau
- 3) Orangtua asuh.

Pengasuhan yang dilakukan tersebut harus mendapat izin dari Dinas Sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil asesmen Pekerja

Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota.

Pemindahan pengasuhan anak pada orangtua asuh dilaksanakan sesuai prosedur yang telah diatur pemerintah demi keamanan, keselamatan dan kesejahteraan anak. Penyiapan keluarga asuh dilakukan terlebih dahulu sebelum penempatan anak di keluarga asuh. (Susilowati, E., 2020).

b. Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak-LKSA (Panti Sosial)

Pengasuhan anak di dalam panti sosial merupakan upaya terakhir dan bersifat sementara sampai dengan dilakukannya pengasuhan permanen. (Pasal 35 PP No. 44 Tahun 2017). Penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) harus berdasarkan asesmen dari Pekerja Sosial yang ditugaskan oleh Dinas Sosial. Pengasuhan Anak di LKSA harus memperhatikan diantaranya:

- 1) Martabat anak;
- 2) Perlindungan anak;
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal;
- 4) Pendidikan;
- 5) Kesehatan;
- 6) Privasi anak;
- 7) Relasi anak baik dengan orangtua, teman dan pengasuh;
- 8) Pemanfaatan waktu luang.

Anak harus memiliki pengasuh tetap selama di LKSA. Perbandingan pengasuh dengan anak adalah 1:5. (Permensos No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak)

Kriteria yang menjadi anak asuh adalah:

- 1) Anak terlantar;
- 2) Anak dalam asuhan keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai orang tua;
- 3) Anak yang memerlukan perlindungan khusus. (PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak).